

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG

2020/2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG

2020/2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN BATANG
2020/2021**

ISBN	:	978-623-7979-34-0
Katalog	:	4102004.3325
No. Publikasi	:	33250.2127
Ukuran Buku	:	18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman	:	viii + 68 halaman
Naskah	:	BPS Kabupaten Batang
Penyunting	:	BPS Kabupaten Batang
Gambar Kulit	:	BPSk Kabupaten Batang
Diterbitkan oleh	:	© BPS Kabupaten Batang
Dicetak oleh	:	CV. Vertical Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah : Eddy Prawoto
Penanggung Jawab : Sri Winarsih, S.Si, M.Ec.Dev
Editor : Sri Winarsih, S.Si, M.Ec.Dev
Penulis : Mustofa, S.ST

Retabulasi : Mustofa, S.ST
Penyusun : Mustofa, S.ST

<https://batangkab.kps.go.id>

KATA PENGANTAR

Buku Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2020/2021** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2020/2021 diharapkan mampu menjembatani penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih dengan tulus. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan demi penyajian yang lebih baik di masa mendatang kepada segenap penggunanya.

Batang, Desember 2021

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Batang**



Eddy Prawoto

DAFTAR ISI

	Halaman
Katalog	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab 1 Kependudukan	2
Bab 2 Kesehatan dan Gizi	13
Bab 3 Pendidikan	19
Bab 4 Ketenagakerjaan	31
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi	45
Bab 6 Perumahan	52
Bab 7 Kemiskinan	59
Bab 8 Kesimpulan	63
Daftar Pustaka	66
Lampiran	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang, 2017-2021	4
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang, Tahun 2017-2021	5
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2017-2021	8
Tabel 1.4	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2017-2021	10
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang sedang Menggunakan alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kab. Batang 2020 dan 2021	11
Tabel 2.1	Angka Kesakitan, 2019-2021 (Persen)	15
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Kabupaten Batang, 2019-2021 (Persen)	16
Tabel 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) dan Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2019 – 2021	22
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 dan 2021	23
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 dan 2021	24
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2020-2021 (Persen)	26
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020 -2021 (Persen)	27
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah 2017/2018 - 2020/2021	29
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017-2021	33
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019 -2021	35
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2019–2021 .	37
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2019–2021	39
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2019–2021	41
Tabel 4.6	Persentase Pekerja Anak Usia 10 - 17 Tahun, 2017–2021	43
Tabel 4.7	Persentase Pekerja Anak Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2019-2021	44
Tabel 5.1	Rata -rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2019-2021	46
Tabel 5.2	Rata - rata Pengeluaran untuk Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Jenis Komoditas (Rupiah), 2021	47
Tabel 5.3	Rata - rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2021	48
Tabel 5.4	Rata-rata Konsumsi Kalaori per Kapita sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2021	49
Tabel 5.5	Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari menurut Komoditas	50

	Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2021	
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2018–2021	54
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita, 2017–2021	55
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan , 2017–2021	56
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017 – 2021	58
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2015–2021	60
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan kemiskinan, 2017-2021 (Rp/Kapita/Bulan)	61

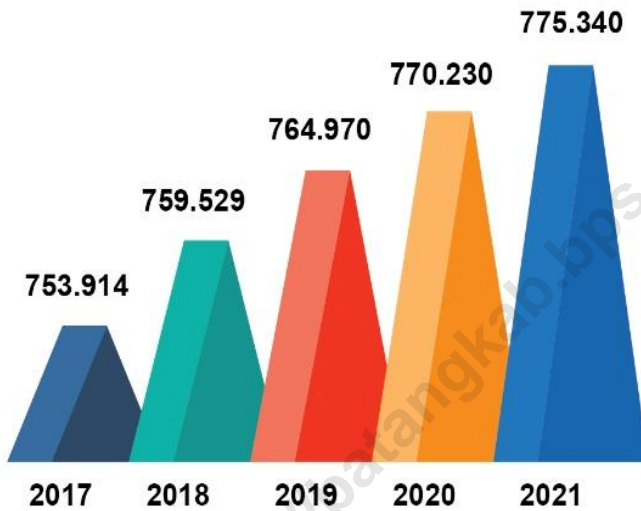
<https://batangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-rata Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang 2016-2021 (persen)	6
------------	--	---

<https://batangkab.bps.go.id>

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BATANG (Jiwa)



Sumber: Proyeksi SUPAS 2015

Rasio Jenis Kelamin

99,85



Kepadatan Penduduk

983 jiwa per km²





BAB 1

KEPENDUDUKAN

Penduduk menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan, oleh karena itu kependudukan merupakan isu yang menarik untuk dicermati. Jumlah penduduk yang tinggi telah menjadi perhatian dunia dengan berbagai teori dan penelitian. Perkembangan terakhir dewasa ini, dalam teori Neo-Malthusian yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, pembatasan jumlah penduduk dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Urgensi dari pengendalian jumlah penduduk ini untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya dengan salah satu fokusnya yakni peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengaturan persebarannya melalui fasilitas program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi serta peningkatan kualitas keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup penduduk yang tidak tercapai, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi, dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman yang tidak layak huni, akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya yaitu terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan, distribusi penduduk juga merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah. Kebijakan Pemerintah terkait kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat menjadi layak dan semakin baik.

JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2021 berdasarkan hasil *Proyeksi SUPAS 2015* tercatat sebanyak 775.340 jiwa. Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2017-2021, data laju pertumbuhan penduduk per tahun mengalami perlambatan. Tahun 2017 penduduk Kabupaten Batang bertambah 5.785 jiwa dari tahun 2016 (748.129 jiwa), tahun 2018 bertambah 5.615 jiwa dari tahun sebelumnya, dan tahun 2021 bertambah 5.110 jiwa dari tahun sebelumnya. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang tahun 2017 yaitu sebesar 0,77 persen, tahun 2016 sebesar 0,74 persen, dan terus melambat hingga tahun 2021 lajunya hanya 0,66 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, selama 5 tahun terakhir, jumlah perempuan selalu lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari nilai *sex ratio* di Kabupaten Batang selalu kurang dari 100. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki mencapai 384.833 jiwa dan perempuan sebanyak 385.397 jiwa. Demikian juga tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 387.387 jiwa dan perempuan sebanyak 387.953 jiwa dengan rasio jenis kelamin 99,85. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan ada 99 orang laki-laki.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Batang, 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
	L	P	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	376.651	377.263	753.914	0,77	99,84
2018	379.470	380.059	759.529	0,74	99,85
2019	382.198	382.772	764.970	0,72	99,85
2020	384.833	385.397	770.230	0,69	99,85
2021	387.387	387.953	775.340	0,66	99,85

Sumber: Proyeksi Supas 2015

PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Batang adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata, menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk disuatu wilayah. Ada kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, sedangkan di kecamatan lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah-masalah sosial

lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja, padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

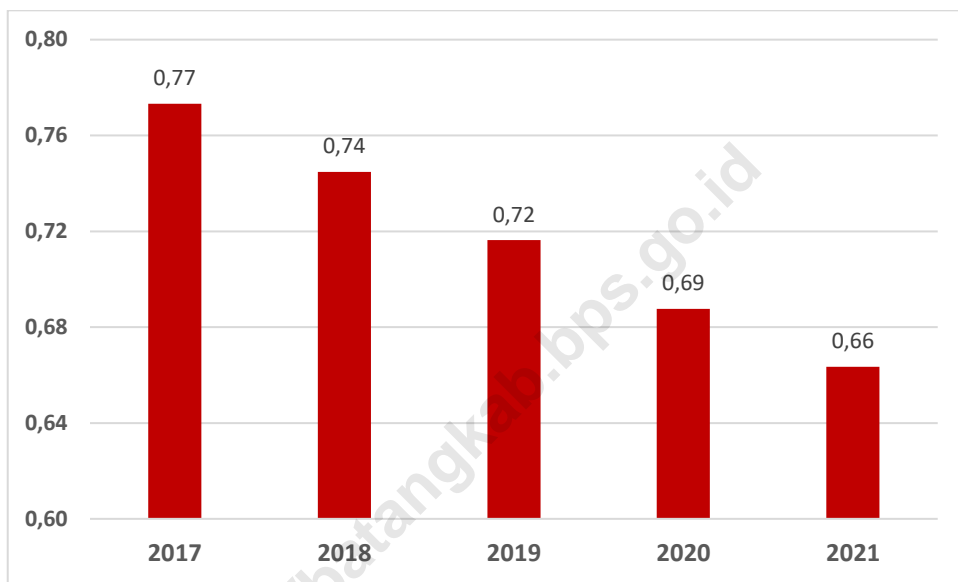
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	753.914	788,64	956
2018	759.529	788,64	963
2019	764.970	788,64	970
2020	770.230	788,64	976
2021	775.340	788,64	983

Sumber : Proyeksi SUPAS 2015

Kepadatan penduduk Kabupaten Batang selalu meningkat tiap tahunnya, tahun 2017 yaitu 956 jiwa/km², kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 963 jiwa/km², dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 976 jiwa/km², bahkan pada tahun 2021 menjadi 983 jiwa/km². Pertumbuhan kepadatan penduduk periode tahun 2017-2021 yaitu sebesar 2,84 persen atau 28 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu sumber ekonomi, pusat pendidikan, ketersediaan fasilitas umum dan daya saing wilayah.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Batang 2017-2021 (Persen)



Perkembangan kepadatan penduduk selama 2017-2021 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan kepadatan penduduk di Kabupaten Batang selama periode tersebut sebesar 0,72 persen. Jika diamati perkembangan pertumbuhan kepadatan penduduk tahun 2017 memiliki laju paling tinggi, yaitu sebesar 0,77 persen. Kemudian untuk tahun selanjutnya angka pertumbuhan ini semakin mengecil, hal ini menunjukkan semakin melambatnya pertumbuhan kepadatan penduduk. Bahkan dua tahun terakhir pertumbuhannya hanya 0,69 persen (tahun 2020) dan 0,66 persen (tahun 2021).

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan,

maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan, maka akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2017-2021, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 43,82 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2021 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 43,27 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 43 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena *Bonus Demografi*. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2017-2021

Tahun	0-14 tahun	65+ tahun	15-64 tahun	Jumlah	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	174.531	524.199	55.184	753.914	43,82
2018	173.429	528.884	57.216	759.529	43,61
2019	172.289	533.289	59.392	764.970	43,44
2020	171.118	537.402	61.710	770.230	43,32
2021	170.028	541.168	64.144	775.340	43,27

Sumber : Proyeksi SUPAS 2015

Menurunnya angka beban ketergantungan, diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai akibat dari berkurangnya angka kelahiran sehingga berdampak pada laju pertumbuhan penduduk. Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka beban ketergantungan mencapai 43,82 persen, yang pada tahun 2021 angka beban ketergantungan tersebut semakin berkurang menjadi 43,27 persen. Hal ini menunjukkan dalam setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 43 orang penduduk tidak produktif.

Struktur umur penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2017 masih didominasi oleh penduduk usia produktif, mencapai 69,53 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi 69,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk yang belum produktif yang berusia muda (0-14 tahun), pada tahun 2017 sebanyak 23,15 persen, hingga tahun 2021 berkurang menjadi 21,93 persen, menunjukkan program KB masih tetap berlangsung dan menunjukkan keberhasilannya untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan penduduk yang

berusia tua 65 tahun ke atas semakin meningkat, pada tahun 2017 sebanyak 7,32 persen hingga tahun 2021 menjadi 8,27 persen. Peningkatan jumlah penduduk tua ini merupakan hal yang positif, karena menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik, sehingga penduduk mempunyai harapan hidup yang lebih panjang. Walaupun di sisi lain juga merupakan tantangan karena dengan bertambahnya jumlah penduduk tua akan meningkatkan angka beban ketergantungan.

WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas di wilayah Kabupaten Batang, tahun 2020-2021 persentase perkawinan pertama wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin terbanyak pada usia dibawah 17 tahun. Untuk perkawinan pertama sebelum berusia 17 tahun tersebut mengalami penurunan dari 46,76 persen pada tahun 2020 menjadi 37,34 persen pada tahun 2021. Persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang perkawinan pertamanya berusia 17 tahun ke atas mengalami peningkatan. Untuk usia perkawinan pertamanya pada usia 17-18

tahun meningkat menjadi 12,14 persen, ini artinya masih terjadi perkawinan di bawah usia 19 tahun. Perlu dikaji lebih dalam waktu kejadian usia perkawinan pertama yang dibawah 19 tahun, apakah terjadi di masa lampau ataukah saat ini.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2017 – 2021

Umur Perkawinan Pertama	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
<17	46,76	37,34
17 - 18	9,76	12,14
19 - 24	27,40	33,06
25+	16,08	17,46

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Pada tahun 2021 persentase wanita yang usia perkawinan pertamanya lebih dari 19 tahun sebanyak 50,52 persen, lebih banyak bila dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 43,48 persen.

PENGUNAAN ALAT/CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan mengurangi angka kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Apabila

cakupan peserta KB semakin meningkat, maka diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Batang 2020-2021

Alat/Cara KB	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW	3,37	6.22
Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP	0,75	0.28
IUD/AKDR/Spiral	6,30	4.26
Suntikan	57,68	59.41
Susuk KB/Implan	11,54	12.74
Pil	18,49	15.89
Kondom /Karet KB	1,34	0.38
Tradisional	0,51	0.82

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kabupaten Batang, namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya. Kepala BKKBN menyatakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan MKJP akan lebih efektif. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB, kemudian diikuti penggunaan pil KB. Pada tahun 2020, penggunaan suntikan mencapai 57,68 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 59,41 persen. Pada penggunaan pil mengalami penurunan, dari 18,49 persen pada tahun 2020 menjadi 15,89 persen pada tahun 2021.

Penggunaan alat/cara KB jangka panjang diantaranya terdapat MOW/Tubektomi, MOP/Vasektomi dan AKDR/IUD/Spiral. Penggunaan alat/cara AKDR/IUD/Spiral pada tahun 2021 sebesar 4,26 persen, berkurang dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,30 persen. Cara KB dengan MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi nampaknya belum begitu populer di kalangan masyarakat, terutama MOP/Vasektomi yang pada 2021 hanya sebesar 0,28 persen.



BAB 2

KESEHATAN & GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Pemerintah Kabupaten Batang menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup Ibu dan Bayi.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Puskesmas, Rumah Sakit, Poskesdes dan Posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Menurut Hendrik L. Blumm seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di University of California, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika penyakit sudah diderita, maka yang terbaik adalah pencegahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin membaiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, maka semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut, dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.1 di bawah ini, adalah hasil Susenas tahun 2019-2021, menunjukkan angka kesakitan penduduk di Kabupaten Batang semakin berkurang, yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 17,00 persen, berkurang sampai menjadi hanya 8,50 persen pada tahun 2021. Demikian juga bila diperhatikan menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, angka kesakitannya mengalami penurunan. Angka kesakitan laki-laki tahun 2019 sebesar 16,67 persen, semakin berkurang hingga menjadi 7,90 persen pada tahun

2021. Sedangkan angka kesakitan perempuan menurun dari 17,33 persen pada tahun 2019 menjadi 9,10 persen pada tahun 2021. Angka kesakitan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan dengan perempuan karena faktor pola hidup dan aktivitas sehari-hari serta perilaku manusia.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan, 2019 – 2021 (Persen)

Tahun	Angka Kesakitan (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	16,67	17,33	17,00
2020	14,10	14,30	14,20
2021	7,90	9,10	8,50

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada.

Ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri merupakan faktor yang dominan.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Batang, 2019 – 2021

Fasilitas Pelayanan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	3,50	4,43	5,02
Rumah Sakit Swasta	2,07	4,54	3,98
Praktek Dokter/klinik/ Bidan/Balai Pengobatan	71,46	67,78	79,71
Puskesmas	25,46	24,94	14,43
Pengobatan Tradisional	2,04	0,64	2,15
Lainnya	0,44	0,20	0,36
% Penduduk yang Berobat jalan	16,92	15,72	7,47

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS, membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum dalam mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan pembayaran premi yang terjangkau. Tidak hanya di Puskesmas dan Rumah Sakit, fasilitas BPJS dapat pula dinikmati di klinik kesehatan terdekat dan dokter keluarga. Pola yang didapat masih sama dengan periode sebelumnya yakni praktek dokter/klinik/bidan/balai pengobatan menjadi tujuan mayoritas masyarakat dalam berobat. Dipilihnya fasilitas ini karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan di rumah sakit.

Pada Tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang melakukan rawat jalan selama tahun 2019-2021 terus berkurang jumlahnya. Pada tahun 2019 mencapai 16,9 persen kemudian pada tahun 2020 menjadi 15,7 persen, dan pada tahun 2021 hanya 7,5 persen. Rendahnya masyarakat yang melakukan rawat jalan di fasilitas kesehatan pada tahun 2021 dikarenakan kekhawatiran dengan wabah covid-19, dan juga adanya pembatasan jumlah pasien RS.

Pada hasil Susenas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir (2019 - 2021), sebagian besar masyarakat berobat jalan ke praktek dokter/klinik/bidan/puskesmas, dikarenakan puskesmas/klinik kesehatan/praktek dokter yang menjadi mitra BPJS merupakan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Bahkan pada tahun 2021 pelayanan pada fasilitas kesehatan ini mencapai hampir 80 persen.

FENOMENA VIRUS COVID-19

Kesehatan global mengalami ujian mulai tahun 2020 dengan merebaknya virus COVID-19 hampir di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi adanya pasien yang positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Di Jawa Tengah, Gubernur mengumumkan adanya pasien yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Sedangkan di Kabupaten Batang pada tanggal 27 Maret 2020, Bupati memerintahkan *tracing* lingkungan untuk menemukan siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19 (pegawai PLTU yang dirawat di Surabaya).

COVID-19 merupakan virus yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian terutama bagi pasien yang sudah memiliki gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, asma, dan lain-lain. Menurut Dinkes Kabupaten Batang tanggal 20 Desember 2021 terdapat 8.051 kasus covid-19, dengan rincian sembuh 7.558 orang dan meninggal sebanyak 490 orang dan di rawat di RS hanya 1 orang dan 2 orang isolasi mandiri (<http://corona.batangkab.go.id/>).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemic Covid-19, diantaranya memberlakukan gerakan hidup sehat dengan gerakan cuci tangan dan selalu memakai masker. Selain itu juga menerapkan metode belajar siswa dari rumah atau *School From Home* (SFH) dan pengaturan hari kerja dari rumah terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau *Work From Home* (WFH). Kemudian juga melakukan pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 serta pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Sampai tanggal 20 Desember 2021, capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Batang sebesar 65,04 persen (Sumber Dinas Kesehatan Kab. Batang).

Kerja keras pemerintah, terutama tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 telah membuahkan hasil dengan melandainya kasus Covid-19 saat ini dibandingkan pada bulan Juli 2021 saat merebaknya Varian Delta. Sekarang kehidupan mulai berjalan ke arah normal dengan diperbolehkan beroperasinya pusat perdagangan, rumah makan, pusat kebugaran, transportasi umum, tempat wisata dan fasilitas umum lainnya dengan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen atau ketentuan yang berlaku, sehingga roda perekonomian mulai bergairah kembali.



BAB 3

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara adalah sama dan tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar serta daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Mengacu pada pembahasan diatas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan didalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru menurut tingkat pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak-anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan tiga skenario untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,01 tahun pada tahun 2012 menjadi 12 tahun pada 2045. Skenario pertama adalah untuk mencapai sasaran 12,35 tahun atau hampir sama dengan Amerika Serikat pada tahun 1995. Skenario kedua adalah untuk mencapai 13,17 tahun, sedangkan skenario ketiga adalah untuk mencapai 14,05 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi program pendidikan menengah universal (PMU) supaya anak usia sampai dengan 18 tahun paling tidak pendidikannya sudah 12 tahun yaitu lulusan SMA, SMK, dan MA (<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1977>).

Tabel 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, 2019 – 2021 (Tahun)

Indikator Pendidikan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Lama Sekolah	6,63	6,87	6,88
Harapan Lama Sekolah	11,88	12,01	12,13

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Secara umum di Kabupaten Batang, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas semakin membaik, hingga pada tahun 2021 mencapai 6,88 tahun. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Batang baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan lulus SD atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dilihat perkembangan selama 2019-2021, rata-rata lama sekolah memang makin meningkat, namun peningkatannya masih minim. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas belum berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun walau upaya Pemerintah yang menginginkan kualitas pendidikan penduduknya makin baik terus digencarkan dengan cara membuka program Kejar Paket A, B dan C pada setiap Kecamatan. Hal ini terkait dengan kesibukan penduduk usia 25 tahun ke atas untuk mencari nafkah, atau mengurus rumah tangga sehingga tidak punya waktu untuk mengejar Pendidikan.

Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). HLS Kabupaten Batang pada tahun 2021 sebesar 12,13 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12 tahun atau lulus SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka HLS ini juga semakin meningkat seiring dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, dengan cara mengenyam pendidikan yang

makin tinggi. Di Kabupaten Batang, beberapa perguruan tinggi telah didirikan yaitu Universitas Selamat Sri dan PSDKU Undip, hal ini diharapkan akan lebih meningkatkan animo masyarakat untuk berpendidikan sampai jenjang tertinggi.

PENDIDIKAN TINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator pendidikan, kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi akan dapat memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan/keahlian yang tinggi, sehingga akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020-2021

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
≤SD/MI	54,03	54.53
SMP/MTS	22,49	23.78
SMA/SMK/MA	18,78	17.66
Perguruan tinggi	4,70	4.03

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan hasil Susenas, selama tahun 2020 – 2021 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah yaitu tidak pernah bersekolah, belum tamat pendidikan setara SD dan hanya tamat setara SD masih cukup besar mencapai 54 persen.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah persentase penduduk yang menamatkannya. Bahkan lulusan Perguruan Tinggi hanya sekitar 4 persen. Adanya pandemi covid sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA ke atas mengalami pergeseran (berkurang). Hal tersebut tentu perlu perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, walaupun banyak tantangan di era pandemi Covid-19. Untuk menghambat penyebaran Virus Covid-19 ini, pendidikan bahkan diselenggarakan secara daring (*online*).

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin & Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 – 2021

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤SD/MI	51,94	52.08	56,1	56.96	54,03	54.53
SMP/MTS	21,33	25.60	23,62	21.98	22,49	23.78
SMA/SMK/MA	21,81	19.00	15,81	16.34	18,78	17.66
Perguruan tinggi	4,92	3.32	4,47	4.72	4,70	4.03

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Pada periode tahun 2020 - 2021, penduduk usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah persentase yang menamatkannya. Lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan setara SD ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada tahun 2021 mencapai 52,08 persen untuk laki-laki dan perempuan sebesar 56,96 persen. Pada jenjang pendidikan setara SD ke bawah ini persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan setara SMP dan setara SMA, persentase penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada perempuan usia 15

tahun ke atas yang sudah tamat pendidikan perguruan tinggi mengalami peningkatan, bahkan persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, laki-laki usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi sebesar 3,32 persen sementara perempuan sebesar 4,72 persen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender yang semakin baik di Kabupaten Batang.

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

APS yaitu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada Tabel 3.4 di bawah ini, berdasar data Susenas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun, secara umum sudah baik dari tahun 2020 ke 2021 yaitu sebesar 99,74 persen. APS menurut jenis kelamin, pada perempuan lebih baik daripada laki-laki. APS Perempuan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2020 maupun 2021. Sedangkan APS laki-laki tetap pada nilai 99,48 persen.

Pada penduduk kelompok usia 13-15 tahun, APS perempuan masih lebih baik daripada laki-laki. Pada tahun 2021 APS perempuan mencapai 98,37 persen membaik dari tahun sebelumnya 96,73 persen, sedangkan pada APS laki-laki pada tahun 2021 mencapai 94,90 persen, kondisi tersebut lebih baik dibanding tahun 2020 yang hanya 93,13 persen.

Sementara untuk penduduk usia 16-18 tahun mengalami fenomena yang berbeda. Pada kelompok usia 16-18 tahun APS laki-laki mengalami peningkatan, sedangkan APS perempuan mengalami penurunan. Secara umum, pada jenjang usia 16-18 tahun, APS hanya sebesar 64,95 persen. Pada kelompok usia ini, APS perempuan lebih rendah dibandingkan APS laki-laki. Bahkan pada tahun 2021 APS perempuan hanya 61,38 persen sedangkan APS laki-laki mencapai 68,46 persen. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan bahwa laki-laki yang lulus pendidikan sekolah menengah atas terutama sekolah menengah kejuruan langsung melanjutkan mengikuti pendidikan perguruan tinggi meskipun ada yang mencari pekerjaan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2020 – 2021 (Persen)

Kelompok Umur	2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,48	100,00	99,74	99,48	100,00	99,74
13-15	93,13	96,73	94,90	94,90	98,37	96,43
16-18	65,19	63,80	64,58	68,46	61,38	64,95

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Selain APS, terdapat pula Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Untuk mengetahui perkembangan APM di Kabupaten Batang, dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2020 – 2021 (Persen)

Jenjang Pendidikan	2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	96,17	94,73	95,46	93,32	99,45	96,43
SMP/MTs	81,92	81,39	81,66	73,54	87,91	79,88
SMA/MA/SMK	56,93	63,07	59,65	59,97	49,55	54,80

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Tabel 3.5 di atas menunjukkan, APM pada jenjang pendidikan SD tahun 2021 mencapai 96,43 persen lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 95,46 persen. Pada tahun 2021, APM perempuan pada jenjang pendidikan setara SD lebih tinggi yaitu 99,45 persen jika dibandingkan APM laki-laki yang hanya 93,32 persen. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, secara umum APM tahun 2021 sedikit memburuk dibanding tahun 2020. Adanya pandemi covid-19, yang proses pembelajarannya dilaksanakan secara *daring* ternyata mempengaruhi dunia pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP, penurunan APM hanya terjadi pada jenjang pendidikan APM laki-laki yaitu dari 81,92 persen pada tahun 2020, menjadi sebesar 73,54 persen pada tahun 2021. Pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan yang mengalami penurunan dari 63,07 persen pada tahun 2020 menjadi 49,55 persen pada tahun 2021. Fenomena yang menarik untuk dicermati yaitu APM perempuan pada jenjang pendidikan SMP semakin baik dibandingkan dengan APM laki-laki. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa perempuan lebih 'tertib usia' dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang ini.

KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidik antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio makin tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani makin banyak murid. Makin banyak murid yang diajarkan, maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/ mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogik, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Selama empat tahun terakhir, pada Tabel 3.6 di bawah, dari tahun ajaran 2017/2018 sampai 2020/2021 terjadi peningkatan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Meningkatnya rasio murid-guru SD menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah siswa SD tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru.

Mengingat karakteristik siswa SD yang membutuhkan perhatian khusus, maka peningkatan rasio murid-guru dikuatirkan membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Berbeda dengan jenjang pendidikan SD, rasio murid guru pada jenjang pendidikan SMP dan SMA justru menurun pada tahun ajaran 2020/2021. Pada jenjang pendidikan SMP yang semula 19 siswa per guru pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi 17 siswa per guru pada tahun ajaran 2020/2021. Demikian pula untuk tingkat SMA dari 19 siswa per guru pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi 17 siswa per guru. Jadi artinya pada tahun ajaran 2020/2021 setiap guru di SMP dan SMA mengampu 17 siswa.

Tabel 3.6 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah, 2017/2018-2020/2021

Tahun	Rasio					
	Murid Guru			Guru Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017/2018	16,68	18,95	19,20	7,74	18,08	22,16
2018/2019	17,86	18,15	17,08	7,25	18,63	25,16
2019/2020	17,67	18,03	17,65	7,41	18,13	25,41
2020/2021	17,69	17,40	17,75	7,49	18,63	25,66

Sumber: Kemendibud 2017-2021

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tiap SD harus memiliki satu guru untuk setiap 32 murid. Pada prakteknya di Kabupaten Batang setiap guru hanya mengampu 17 siswa SD, walaupun rasio murid-guru sudah sangat ideal akan tetapi harus diwaspadai sebarannya yang tidak merata. Kemendikbud sudah melakukan pemetaan, melihat di kawasan mana guru tersertifikasi menumpuk di satu sekolah. Dari sekolah-sekolah seperti itulah, guru akan didistribusi, disalurkan ke sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah, untuk itu maka kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Secara umum, pada Tabel 3.6 di atas, selama 4 tahun terakhir dari tahun 2017/2018 sampai 2020/2021 terdapat tendensi meningkatnya rasio guru-sekolah pada semua jenjang pendidikan SMP dan SMA. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SD mengalami penurunan rasio guru-sekolah. Penurunan rasio guru-sekolah pada tingkat SD kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sekolah baru dan dikuatirkan dapat menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif karena jumlah tenaga pengajar yang masih kurang.



BAB 4

KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan terus menjadi perhatian pemerintah agar tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya perluasan kesempatan kerja, banyaknya pekerja anak, rendahnya produktivitas kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan sebagainya dapat ditanggulangi dengan tepat dan benar. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan di Kabupaten Batang. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan, sangat membutuhkan data dan informasi ketenagakerjaan. Strategi dan program ketenagakerjaan yang tepat sangat ditentukan kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk bukan angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatannya sekolah, atau yang mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Secara alamiah, pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja diserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Batang. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumahtangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja

yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017-2021 (Persen)

Tahun	TPAK			TPT		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	84,25	51,43	67,70	6,81	4,23	5,82
2018	83,71	56,63	70,05	4,22	4,24	4,23
2019	82,61	54,70	68,53	5,16	2,69	4,16
2020	86,48	53,24	69,78	6,48	7,63	6,92
2021	85,49	57,45	71,40	6,01	7,43	6,59

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas

Selama 5 tahun terakhir TPAK Kabupaten Batang secara umum memiliki trend meningkat. Pada tahun 2017 TPAK yaitu mencapai sebesar 67,70 persen kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 70,05 persen, bahkan pada tahun 2021 mencapai 71,40 persen. Apabila dilihat menurut jenis kelamin pada periode tahun 2017-2021, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, yaitu tahun 2017 TPAK laki-laki sebesar 84,25 sedangkan TPAK perempuan 51,43, bahkan pada tahun 2021 TPAK laki-laki sebesar 85,49 sedangkan TPAK perempuan 57,45. Analisis TPAK tanpa variabel lainnya tidak akan menarik, karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Selain TPAK, indikator ketenagakerjaan lainnya adalah TPT, yaitu menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang digambarkan sebagai ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil daripada pencari kerja, sehingga lapangan pekerjaan tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kabupaten Batang selama periode 2017-2019 mengalami perbaikan, yaitu terjadi pengurangan pengangguran, tahun 2017 sebesar 5,82 persen, pada tahun 2018 berkurang menjadi 4,23 persen, dan pada tahun 2019 terus berkurang menjadi 4,16. Angka TPT tersebut berarti, pada tahun 2017 terdapat pengangguran sebanyak hampir 6 orang dari 100 orang angkatan kerja, hingga tahun 2019 menjadi hanya 4 orang yang menganggur dari 100 orang angkatan kerja. Namun dalam dua tahun terakhir, tahun 2020 dan 2021, kembali terjadi penambahan pengangguran, yaitu 6,92 persen pada tahun 2020, dan membaik menjadi 6,59 persen pada tahun 2021. Hal ini berarti terdapat pengangguran sebanyak hampir 7 orang dari 100 orang angkatan kerja.

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi, untuk itu mereka berupaya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak segera mendapatkan pekerjaan lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

Perkembangan TPT menurut jenjang pendidikan selama periode 2019-2021 memiliki disparitas yang berbeda-beda. Jika pada tahun 2019 TPT menurut pendidikan

terdistribusi antara 4,32 persen sampai 13,76 persen antar jenjang pendidikan, kemudian melebar pada tahun 2020 terdistribusi antara 4,14 persen sampai 21,99 persen. Akan tetapi tahun 2021 disparitasnya kembali menyempit yang terdistribusi antara 4,52 persen sampai 12,73 persen.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2019 – 2021 (Persen)

Kelompok Usaha	2019			2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
≤ SD	6,77	1,47	4,32	3,55	4,98	4,14	4,62	4,39	4,52
SMP	6,94	1,74	4,97	3,64	11,24	6,22	4,86	14,43	8,53
SMA Umum	2,12	10,42	4,99	8,8	11,32	9,64	4,29	12,86	7,54
SMA Kejuruan	13,73	13,86	13,76	21,62	23,12	21,99	15,93	5,14	12,73
Universitas	10,23	2,87	6,78	31,11	13,82	17,83	2,56	19,26	12,03

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas

Tabel 4.2. di atas menggambarkan bahwa pada struktur TPT menurut tingkat pendidikan, ada kecenderungan TPT lebih tinggi untuk tingkat pendidikan menengah tinggi. Pada tingkat pendidikan rendah dan yang belum pernah bersekolah hampir semua angkatan kerja dapat tertampung di lapangan pekerjaan dengan segala kondisi dan jenis pekerjaan. TPT pada jenjang pendidikan SMA Kejuruan merupakan TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, mencapai lebih dari 10 persen. Sementara TPT pada tingkat pendidikan perguruan tinggi juga sudah lebih tinggi dibandingkan tingkat SMA.

Jika diamati berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perdesaan memiliki disparitas yang cukup tinggi di bandingkan perkotaan. Pada daerah perdesaan, orang yang memiliki pendidikan rendah jarang dijumpai sedang menganggur. Sebaliknya, mereka yang

berpendidikan tinggi lebih sulit untuk memperoleh pekerjaan di perdesaan dibandingkan daerah perkotaan.

LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (mencakup pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri (mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan), dan jasa-jasa (mencakup perdagangan besar, eceran, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan).

Mulai tahun 2020, merebaknya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi roda perekonomian di Kabupaten Batang, banyak kasus PHK atau menghentikan sementara karyawannya oleh perusahaan besar. Selain itu badai Covid-19 juga memperburuk kondisi UMKM, sampai menyebabkan banyak UMKM yang gulung tikar. Karena adanya larangan berkerumun sebagian kegiatan perekonomian beralih secara daring (*online*).

Pada Tabel 4.3 di bawah ini, perkembangan lapangan usaha selama 2019 – 2021, menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa mengalami peningkatan. Pada sektor pertanian dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan penyerapan atau menguat, semula 21,08 persen menjadi 23,58 persen. Tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami perlemahan, menjadi 21,81 persen. Di sektor industri mengalami hal yang sebaliknya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami sedikit perlemahan, tahun 2019 sebesar 34,74 persen, kemudian pada tahun 2020 menjadi 34,17 persen, dan pada tahun 2021 kembali membaik menjadi sebesar 35,07 persen. Pada sektor Jasa-jasa hampir sama dengan sektor industri, tahun 2019 sebesar 44,18 persen, mengalami sedikit perlemahan

pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,26 persen, dan kembali membaik pada tahun 2021 menjadi sebesar 43,12 persen.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, gambaran pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor industri dari sektor lainnya, lebih terasa terutama bagi pekerja perempuan. Pada sektor industry, tahun 2020 sebesar 27,64 persen, meningkat pada tahun 2021 menjadi 31,15 persen, sedangkan pekerja laki-laki pada tahun 2020 terserap 38,18 persen berkurang pada tahun 2021 menjadi 37,69 persen. Pengurangan penyerapan tenaga kerja sektor industri diduga sebagai dampak dari penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa-jasa seperti perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel, angkutan dan pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, sewa bangunan, tanah dan jasa kemasyarakatan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2019 – 2021

Kelompok Usaha	2019			2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian (A)	25,14	15,21	21,08	26,64	18,59	23,58	25,75	15,93	21,81
Industri (M)	36,53	32,16	34,74	38,18	27,64	34,17	37,69	31,15	35,07
Jasa-jasa (S)	38,34	52,63	44,18	35,18	53,77	42,26	36,56	52,92	43,12

Sumber: Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan:

Pertanian(A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.

Jasa-Jasa(S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Tabel

4.4. di bawah ini menggambarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir. Mayoritas penduduk Kabupaten Batang bekerja sebagai buruh/karyawan, disusul berusaha sendiri, selanjutnya sebagai pekerja bebas pada urutan ketiga. Melihat perkembangan status pekerjaan selama tahun 2019 sampai 2021, status sebagai buruh/karyawan meningkat, tahun 2019 sebesar 35,66 persen, tahun 2020 sebesar 35,38 persen kemudian pada tahun 2021 menjadi 36,54 persen. Namun status berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar makin berkurang pada tahun 2019 sebesar 4,26 persen, tahun 2020 sebesar 3,93 persen, dan tahun 2021 menjadi 2,93 persen. Status pekerjaan mandiri lainnya yaitu berusaha sendiri juga cenderung menurun, yaitu pada tahun 2019 sebesar 26,24 persen, tahun 2020 sebesar 21,25 persen, dan tahun 2021 menjadi 23,16 persen. Status pekerjaan berusaha sendiri yang cenderung berkurang sebagai gambaran keadaan ketenagakerjaan yang kurang menggembirakan. Hal ini berarti berbagai program pemerintah untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang bisa eksis dalam berbagai kondisi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Status pekerjaan yang cenderung meningkat selain buruh/karyawan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar. Persentase pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar yang cenderung meningkat, merupakan perkembangan kurang positif, karena status pekerjaan ini menggantungkan pada keluarga atau orang lain.

Struktur pekerja menurut status pekerjaan, menurut jenis kelamin, maka status buruh/karyawan sangat dominan diminati oleh pekerja di Kabupaten Batang, persentasenya sepertiga dari jumlah pekerja secara keseluruhan. Selama tahun 2019 sampai 2021, status buruh/karyawan/pegawai terus mengalami peningkatan, terutama pada pekerja laki-laki, yaitu tahun 2019 sebesar 36,93 persen, tahun 2020 sebesar 38,23 persen, dan tahun 2021 meningkat menjadi 39,03 persen.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2019-2021

Status Pekerjaan Utama	2019			2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berusaha sendiri	20,78	34,13	26,24	17,50	27,36	21,25	17,99	30,89	23,16
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	9,98	10,99	10,39	11,83	13,66	12,53	11,51	12,86	12,05
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,41	2,60	4,26	4,89	2,36	3,93	3,51	2,06	2,93
Buruh/karyawan/pegawai	36,93	33,82	35,66	38,23	30,75	35,38	39,03	32,81	36,54
Pekerja Bebas	23,19	5,86	16,10	22,81	8,25	17,27	23,67	7,02	17,00
Pekerja keluarga/tak dibayar	3,71	12,59	7,34	4,74	17,61	9,64	4,29	14,37	8,33

Sumber: Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Status pekerjaan laki-laki yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar terus berkurang. Pada tahun 2019 mencapai sebesar 5,41 persen, tahun 2020 berkurang menjadi 4,89 persen, dan tahun 2021 berkurang lagi menjadi 3,51 persen. Demikian juga untuk status pekerjaan perempuan yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar juga terus berkurang. Pada tahun 2019 mencapai sebesar 2,60 persen, tahun 2020 berkurang menjadi 2,36 persen, dan tahun 2021 berkurang lagi menjadi 2,06 persen.

JUMLAH JAM KERJA

Dalam mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pendekatan jumlah jam kerja. Penggunaan pendekatan ini dengan asumsi semakin besar jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja maka semakin produktif. Terkait jumlah jam kerja normal seminggu yang digunakan untuk bekerja adalah 35 jam seminggu. Seseorang yang bekerja selama seminggu kurang dari 35 jam dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kemampuannya. Dengan asumsi di atas, maka setengah penganggur memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan jam kerja normal.

Melihat perkembangan penduduk bekerja menurut jam kerja selama 2019 sampai 2021, pekerja setengah penganggur cenderung berkurang, pada tahun 2019 sebesar 28,01 persen, yang pada tahun 2021 menjadi 35,56 persen. Berkurangnya pekerja setengah penganggur dengan sendirinya mengakibatkan pekerja yang bekerja sesuai jam kerja normal semakin meningkat. Artinya, secara umum dengan berkurangnya penduduk yang bekerja setengah menganggur, maka tingkat produktivitas semakin meningkat. Namun kesimpulan ini hanya dari sisi penggunaan waktu bekerja, masih harus dilihat juga besarnya upah/gaji/pendapatan yang diterima.

Melihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, dari sisi produktivitas pekerjaan dan waktu bekerja, terjadi ketimpangan yang cukup signifikan pada periode waktu tahun 2019-2021. Pada tahun 2019, pekerja perempuan yang bekerja kurang dari jam kerja normal mencapai sebesar 37,42 persen, sedangkan laki-laki sebesar 21,49 persen. Pada tahun 2020 ketimpangan lebih besar, yaitu pekerja perempuan yang bekerja kurang dari jam kerja normal sebanyak 69,36 persen, sedangkan laki-laki hanya 37,38 persen. Pada tahun 2021 ketimpangannya masih tinggi, pekerja perempuan sebesar 46,45 persen dan pekerja laki-laki sebesar 28,29 persen.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2019 – 2021

Jmlah Jam Kerja	2019			2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	1,43	1,92	1,63	22,75	52,35	37,62	4,25	3,86	4,09
1-14	2,65	7,63	4,69	2,91	4,69	3,80	4,14	7,96	5,67
1-34	17,41	27,87	21,69	11,72	12,32	12,03	19,90	34,63	25,80
35+	81,16	70,22	76,68	62,61	30,64	46,55	75,86	61,51	70,11

Sumber : Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan : *)Jumlah jam kerja penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja

PEKERJA ANAK

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan seorang anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil tanpa mempertimbangkan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depannya.

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat. Selain itu juga disebabkan karena faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor-faktor lain. Dari faktor ekonomi, kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini mendorong anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan.

Faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja adalah anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Tingkat pendidikan yang rendah pada orangtua, membuat orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya, sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa mendatang. Faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja adalah tersedianya lahan pekerjaan yang dapat dikerjakan dan dimasuki oleh anak. Masih adanya pelaku usaha yang menerapkan pola perekrutan untuk memperoleh tenaga yang murah dan mudah diatur, turut mendorong adanya pekerja anak. Menurut WHO, usia seseorang yang dikategorikan anak adalah dibawah 18 tahun (0-17 tahun). Namun data yang tersedia dari Sakernas adalah anak usia 10 tahun ke atas, sehingga dalam penyajian informasi pekerja anak adalah anak dengan rentang usia 10-17 tahun. Selama kurun waktu 3 tahun (2017 - 2021) persentase pekerja anak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, pekerja anak masih sebanyak 0,99 persen, dan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,73 persen. Namun tahun 2020 persentase pekerja anak mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 1,60 persen. Tetapi tahun 2021 persentasenya turun lagi menjadi sebesar 1,34 persen.

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, selama kurun waktu 2017 – 2021 ditemukan pekerja anak dengan persentase yang fluktuatif, ini ditunjukkan dari persentase pekerja anak tahun 2017 yaitu pekerja anak didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 1,16 persen dan laki-laki hanya 1,06 persen, begitupun tahun 2018, masih didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 1,77 persen dan laki-laki sebesar 1,71 persen. Pada tahun 2019, pekerja anak didominasi oleh laki-laki sebesar 1,02 persen dan perempuan sebesar 0,95 persen. Tahun 2020 dan 2021, pekerja anak kembali didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 2,14 persen di tahun 2020 dan 1,63 persen di tahun 2021. Sedangkan pekerja anak laki-laki sebesar 1,28 persen di tahun 2020 dan 1,16 persen di tahun 2021.

Tabel 4.6 Persentase Pekerja Anak Usia 10-17 Tahun, 2017- 2021

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1,06	1,16	1,09
2018	1,71	1,77	1,73
2019	1,02	0,95	0,99
2020	1,28	2,14	1,60
2021	1,16	1,63	1,34

Sumber: Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Pada Tabel 4.7 di bawah ini, yaitu Pekerja Anak berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2019 sebagian besar pekerja anak tertampung pada lapangan usaha kelompok jasa-jasa yaitu sebesar 63,24 persen, lalu disusul lapangan usaha pertanian 24,24 persen. Perkembangan selama 2019-2021, terdapat pengurangan pada sektor jasa-jasa yang diikuti peningkatan pada kelompok industri. Sektor jasa-jasa tahun 2020 berkurang menjadi 57,19 persen, dan ditahun 2021 berkurang lagi menjadi 47,06 persen. Untuk sektor industri tahun 2020 sebesar 42,81 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 12,52 persen, tetapi tahun 2021 berkurang lagi menjadi sebesar 34,94 persen. Pekerjaan pada sektor pertanian mengalami sedikit pengurangan, yaitu tahun 2019 sebesar 24,24 persen yang tahun 2021 menjadi sebesar 18,00 persen. Dominasi sektor pertanian pada tahun 2019 mulai bergeser ke sektor jasa-jasa dan industri.

Namun apabila diamati menurut jenis kelamin, perubahan terbesar yaitu pada pekerja anak perempuan di sektor jasa-jasa, yaitu tahun 2019 mencapai sebesar 100,00 persen. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 terdistribusi ke sektor industry, yaitu sebesar

33,56 persen dan 27,88 persen. Disisi lain, pekerja laki-laki di sektor industri mengalami peningkatan, tahun 2019 yaitu sebesar 20,61 persen dan pada tahun 2020 menjadi 52,30 persen. Tetapi pada tahun 2021 kembali berkurang menjadi 41,57 persen. Untuk sektor pertanian, komposisi pekerja anak laki-laki dan perempuan relatif tidak banyak mengalami perubahan. Gambaran pekerja anak menurut kelompok lapangan usaha tidak berbeda dengan gambaran tenaga kerja secara umum, atau dengan kata lain adalah adanya orang tua bekerja maka disitulah anak belajar bekerja.

Tabel 4.7 Persentase Pekerja Anak Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2019 – 2021

Lapangan Usaha	2019			2020			2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian (A)	39,89	0,00	24,24	0	0	0	34,94	0	18,00
Industri (M)	20,61	0,00	12,52	52,30	33,56	42,81	41,57	27,88	34,94
Jasa-jasa (S)	39,50	100,00	63,24	47,70	66,44	57,19	23,49	72,12	47,06

Sumber: Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus

Catatan:

Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan

Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi;

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.



BAB 5

TARAF & POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumahtangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga dikatakan sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumahtangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yang perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran,

2019-2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	455 463	510 704	494,856	55,40	52,95	54,03
Bukan Makanan	366 687	453 712	421,000	44,60	47,05	45,97
Perumahan	185 887	222 970	214,633	22,61	23,12	23,44
Barang & Jasa	78 100	101 076	91,942	9,50	10,48	10,04
Pakaian	24 552	28 773	28,033	2,99	2,98	3,06
Barang Tahan Lama	46 302	43 785	41,896	5,63	4,54	4,57
Lainnya	31 847	57 107	44,496	3,87	5,92	4,86
Jumlah	822 150	964 416	915 857	100	100	100

Sumber: Susenas

Tabel 5,1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2019 – 2021. Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2019-2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 822.150,00 menjadi Rp 964.416,00, namun tahun 2021 berkurang menjadi Rp 915.857,00. Apabila dilihat persentasenya, maka pengeluaran untuk makanan berkurang dari 55,40 persen pada tahun 2019 menjadi 52,95 persen pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 54,03 persen. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan meningkat dari 44,60 persen pada tahun 2019 menjadi 47,05 persen tahun 2020, dan tahun 2021 berkurang menjadi 45,97 persen. Berkurangnya pengeluaran pada makanan tidak semata-mata diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat memburuk, namun bisa pula disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas pangan pada tahun 2020, sehingga kuantitas yang dikonsumsi berkurang. Sementara itu, pengeluaran non-makanan mengalami peningkatan, pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama dan barang

lainnya mengalami peningkatan, hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2 Rata – rata Pengeluaran untuk Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas, 2021 (Rupiah)

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	49.335	54.147	69.352	55.260
Umbi-Umbian	3.167	4.548	5.716	4.229
Ikan	18.610	28.428	57.359	30.281
Daging	11.976	21.771	44.993	22.493
Telur dan Susu	15.922	20.705	45.102	23.667
Sayur-Sayuran	31.048	47.733	69.158	45.339
Kacang-Kacangan	9.803	15.430	20.329	14.157
Buah-Buahan	9.335	22.124	43.480	21.275
Minyak dan Kelapa	9.962	14.683	20.399	13.937
Bahan Minuman	13.421	20.312	28.700	19.231
Bumbu-Bumbuan	8.249	13.340	19.370	12.508
Bahan Makanan Lainnya	5.669	8.699	13.071	8.360
Makanan Minuman Jadi	92.844	161.116	262.103	153.982
Rokok dan Tembakau	41.763	73.485	120.240	70.137
Total Makanan	321.102	506.519	819.373	494.856

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Jika dilihat rata-rata pengeluaran makanan per kapita menurut kelompok pengeluaran per kapita sebulan, didominasi oleh pengeluaran untuk makanan jadi yaitu sebesar Rp 92.844,00 (kelompok 40 % terbawah), kemudian disusul pengeluaran untuk padi-padian yaitu sebesar Rp 49.335,00 (kelompok 40 % terbawah), pengeluaran untuk membeli

rokok dan tembakau Rp 41.763,00 (kelompok 40 % terbawah), dan pengeluaran terkecil yaitu untuk membeli umbi umbian yaitu mencapai sebesar Rp 3.167,00 (kelompok 40 % terbawah).

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dkuatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Tabel 5.3 Rata –rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas, 2021 (Rupiah)

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	98.334	20.689	462.972	214.633
Aneka Barang dan Jasa	41.243	85.791	205.759	91.942
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	12.256	29.762	56.158	28.033
Barang Tahan Lama	5.359	24.058	150.756	41.896
Pajak, Pungutan dan Asuransi	19.705	32.994	72.724	35.617
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	708	6.209	30.586	888
Total Bukan Makanan	177.604	385.702	978.956	421.000

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Tabel 5.4 Rata-rata Konsumsi Kalori Per kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2021

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Per kapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	705,17	743,91	781,05	735,83
Umbi-Umbian	41,33	43,57	41,17	42,20
Ikan	35,29	44,81	66,52	45,34
Daging	34,47	62,49	87,06	56,19
Telur dan Susu	38,94	47,32	72,87	49,07
Sayur-Sayuran	36,87	44,33	50,76	42,63
Kacang-Kacangan	53,50	65,41	74,82	62,53
Buah-Buahan	28,74	44,20	63,25	41,82
Minyak dan Kelapa	198,77	261,38	293,97	242,84
Bahan Minuman	82,33	116,53	136,64	106,87
Bumbu-Bumbuan	12,99	21,06	22,47	18,11
Bahan Makanan Lainnya	33,63	46,01	58,48	43,55
Makanan Minuman Jadi	497,61	659,90	787,37	620,44
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Makanan	1,799,63	2,200,92	2,536,43	2,107,42

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.5 Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2021

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	16,56	17,51	18,41	17,31
Umbi-Umbian	0,35	0,41	0,39	0,38
Ikan	5,82	7,42	11,53	7,60
Daging	2,13	3,86	5,56	3,51
Telur dan Susu	2,20	2,77	4,20	2,83
Sayur-Sayuran	2,23	2,55	2,83	2,48
Kacang-Kacangan	5,38	6,55	7,47	6,27
Buah-Buahan	0,28	0,45	0,65	0,42
Minyak dan Kelapa	0,12	0,18	0,21	0,16
Bahan Minuman	0,60	0,85	1,09	0,80
Bumbu-Bumbuan	0,54	0,84	0,92	0,74
Bahan Makanan Lainnya	0,70	0,93	1,15	0,88
Makanan Minuman Jadi	16,63	20,48	27,39	20,32
Rokok dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Makanan	53,55	64,78	81,80	63,69

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas

Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Batang sebesar 2.107,42 kkal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk Kabupaten Batang di Tahun 2021 belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan, Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Batang yaitu sebesar 63,69 gram pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram per hari telah terpenuhi penduduk Kabupaten Batang.

<https://batangkab.bps.go.id/>



BAB 6

PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no. 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat

menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya

KUALITAS RUMAH TINGGAL

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2018-2021, persentase rumahtangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya pengurangan, walaupun berkurangnya tersebut tidak terlalu banyak. Pada tahun 2019, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 88,40 persen, atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 86,55 persen. Pada tahun 2019–2021 mengalami pengurangan, pada tahun 2019 sebesar 88,40 persen menjadi 88,20 persen pada tahun 2020, dan terus berkurang pada tahun 2021 menjadi 86,23 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, walaupun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantai bukan tanah, namun di daerah perdesaan, rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantai tanah masih dapat dikatakan lebih banyak dari pada di perkotaan.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2018-2021

Indikator Perumahan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai Bukan Tanah (%)	86,55	88,40	88,20	86,23
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, Esbes (%)	100,00	100,00	99,94	99,34
Dinding Terluas Tembok dan Kayu (%)	99,13	98,24	98,87	99,38

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100,00 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 berkurang, masing-masing menjadi 99,94 persen dan 99,34 persen. Pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 99,13 persen, lalu berkurang pada tahun 2019 menjadi 98,24 persen, dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 98,87 persen, kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 99,38 persen.

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat, Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk penghuninya.

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 m², sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia,

ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2017-2021

Luas Lantai Hunian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤7,2 m ²	1,48	0,76	2,49	1,62	1,19
7,3-9,9 m ²	2,94	3,51	4,15	2,71	2,56
≥10 m ²	95,59	95,72	93,36	95,67	96,25

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, lebih dari 90 persen rumah tangga memiliki rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m². Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita yang memenuhi standar WHO mengalami tren yang positif, pada tahun 2017 sebesar 95,59 persen hingga kemudian pada tahun 2021 menjadi 96,25 persen.

FASILITAS RUMAH TINGGAL

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada Tabel 6.3 di bawah ini, fasilitas perumahan yang penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena

cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017-2019, sebanyak 100,00 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, baik di perkotaan maupun di perdesaan telah 100,00 persen atau seluruhnya menikmati listrik. Tetapi dari hasil Susenas 2020 ada sebanyak 99,45 persen rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik, dan 0,55 persen rumah tangga menggunakan penerangan selain listrik.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2017 –2021

Fasilitas Perumahan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penerangan Listrik	100	100	100	99,45	100
Air Minum Kemasan/Isi Ulang/Leding	21,93	28,13	24,14	27,66	26,06
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	60,12	72,71	50,28	39,24	35,03

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Dari data hasil Susenas 2017-2021, rumah tangga di Kabupaten Batang yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak jumlahnya fluktuatif. Tahun 2017 sebesar 21,93 persen, tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 28,13 persen, kemudian pada tahun 2019 berkurang menjadi 24,14 persen, lalu pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 27,66 persen, dan tahun 2021 kembali berkurang menjadi 26,06 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak “saniter” akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air. Selain itu, juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban

yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2017-2021 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan septiktank menunjukkan adanya kecenderungan berkurang. Tahun 2017 sebesar 60,12 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 72,71 persen, tetapi berkurang pada tahun 2019 menjadi 50,28 persen, dan terus berkurang tahun 2020 menjadi 39,24 persen dan tahun 2021 sebesar 35,03 persen. Terjadinya pengurangan ini dikarenakan tidak adanya perawatan tangki septik sehingga pembuangannya beralih ke sungai atau tanah.

STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan, dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal, Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal, Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orangtua/saudara atau status kepemilikan lainnya, Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang,

Berdasarkan hasil Susenas 2021, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,91 persen, sisanya 6,09 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 0,42 persen kontrak/sewa, sedangkan rumah tangga yang tinggal bebas sewa/rumah dinas/lainnya sebanyak 5,67 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan, hal ini dimungkinkan karena harga jual rumah di daerah perkotaan lebih mahal dari pada di perdesaan, sehingga banyak penduduk yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017–2021

Fasilitas Perumahan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik sendiri	92,92	94,06	94,40	95,56	93,91
Kontrak/sewa	1,03	0,86	0,55	0,56	0,42
Bebas sewa	5,94	4,89	4,80	3,13	5,67
Dinas	0	0,18	0,26	0,75	0

Sumber: Diolah dari Hasil Susenas



BAB 7

KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan, Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS), Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik, Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Batang,

Kemiskinan disuatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya,

PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN

Selama periode 2015-2019, penduduk miskin di Kabupaten Batang menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menggembirakan, meskipun para pemangku kebijakan terlihat belum “puas” dengan capaian tersebut. Penurunan kemiskinan konsisten terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Meskipun jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan, namun penurunan kemiskinan tahun 2019 lebih banyak di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2020-2021, penduduk miskin di Kabupaten Batang kembali mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh imbas adanya pandemi Covid-19 yang memukul kegiatan usaha sehingga daya beli masyarakat menurun. Persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 8,35 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,13

persen, dan kembali memburuk pada tahun 2021 yaitu menjadi 9,68 persen. Untuk menganalisis kemiskinan lebih lanjut, perlu dilihat besaran lain seperti garis kemiskinan (GK), tingkat kedalaman kemiskinan (P1), dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2015-2021

Tahun	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(3)	(4)
2015	83 530	11,27
2016	82 560	11,04
2017	81 500	10,80
2018	66 078	8,69
2019	64 070	8,35
2020	70 570	9,13
2021	74 910	9,68

Sumber: KBDA KAB, Batang 2021

GARIS KEMISKINAN (GK), INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P₁), INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P₂)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan, Garis kemiskinan di Kabupaten Batang mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, garis kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar Rp 249.292,00 yang artinya adalah seorang penduduk di Kabupaten Batang bila pengeluarannya dalam waktu sebulan untuk hidup sehari-hari kurang dari nilai tersebut, maka disebut sebagai penduduk miskin. Tahun 2018 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 256.549,00 dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 286.116,00 hingga kemudian tahun 2020 menjadi Rp 309.202,00 dan tahun 2021 menjadi

Rp 318.330,00. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun dan juga meningkatnya gaya hidup penduduk.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2017-2021 (Rp/Kapita/Bulan)

Indikator Kemiskinan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan	249 292	256 549	286 116	309 202	318 330
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,51	1,08	0,69	1,43	1,76
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,31	0,23	0,08	0,32	0,48

Sumber: KBDA KAB, Batang 2021

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Batang selama periode 2017 hingga 2019 cukup menggembirakan, yaitu selama tiga tahun tersebut tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan, namun dalam dua tahun terakhir, tahun 2020 dan 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan lagi, yang bahkan pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,76 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1,51.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kondisi P2 di Kabupaten Batang tidak berbeda jauh dengan P1, dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 sebesar 0,48 lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 0,31.

Meskipun beberapa indikator kemiskinan menunjukkan hal yang kurang menggembirakan karena dampak dari wabah covid-19, namun upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih diprioritaskan pada kegiatan proyek padat karya, utamanya di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”, hal ini agar target kemiskinan sesuai RPJMD dapat dipenuhi, Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, dan juga kondisi perumahan, Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran,



KESIMPULAN

Kabupaten Batang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh penduduk bermata pencaharian pertanian. Dalam lima tahun terakhir, angka ketergantungan penduduk terus berkurang dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi tersebut disebut dengan *bonus demografi* yaitu jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi tersebut akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif yang ada adalah penduduk yang berkualitas yaitu berpendidikan tinggi dan terampil atau berkeahlian.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kabupaten Batang yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mudah dijangkau. Untuk menjadi perhatian yang mendasar adalah bahwa kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 20 persen APBN untuk dunia Pendidikan sangatlah tepat.

Mulai tahun 2016, terjadi pergeseran persentase lapangan usaha utama dari pertanian menjadi industri. Pergeseran ini didorong oleh semakin sempitnya lahan pertanian di Kabupaten Batang dan juga ketertarikan penduduk pada lapangan usaha ini mulai berkurang, yang mengakibatkan produktifitas hasil pertanian juga berkurang. Berkurangnya minat pada lapangan usaha pertanian disebabkan oleh banyak hal, antara lain tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang mendorong angkatan kerja untuk mendapatkan

pekerjaan yang lebih baik dengan upah/keuntungan lebih tinggi yang saat ini banyak ditawarkan oleh lapangan usaha kategori industri.

Rumah tangga dikatakan sejahtera jika pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk non makanan. Pada tahun 2021, pola pengeluaran kembali didominasi oleh pengeluaran makanan, setelah sebelumnya pengeluaran non-makanan sempat berkurang lebih banyak. Pengeluaran untuk non-makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Jika dilihat dari sisi makanan, konsumsi kalori dan juga asupan protein penduduk Kabupaten Batang sudah mencukupi standar kecukupannya seperti yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan & Gizi.

Membbaiknya pendapatan penduduk berdampak pula pada membaiknya kualitas perumahan yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase lantai bukan tanah, penggunaan atap beton maupun genteng, penggunaan dinding tembok dan kayu, penggunaan air bersih, penggunaan listrik, penggunaan jamban sendiri, dan lain-lain. Selain hal tersebut, kepemilikan rumah milik sendiripun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan upaya pemerintah membangun rumah sederhana, ditambah dengan dukungan perbankan yang semakin menekan bunga KPR makin rendah. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 98 persen rumah tangga di Kabupaten Batang telah memiliki fasilitas perumahan dengan luasan minimal 10 m² per kapita, yang hal ini berarti sudah sesuai dengan standar minimal dari *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA).

Meningkatnya konsumsi non makanan, membaiknya kualitas pendidikan dan perumahan dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan penduduk, akan tetapi pada masa pandemi covid-19 saat ini daya beli masyarakat mengalami pelemahan, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Batang. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin menjauh. Sementara itu, indeks keparahan

kemiskinan yang meningkat menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri semakin tinggi atau semakin parah.

<https://batangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA



Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2021.

Berita Resmi Statistik Kemiskinan Kabupaten Batang 2021.

Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang 2021.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. *Statistik Kesejahteraan Prov. Jateng 2021*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang.

BPS Kabupaten Batang, 2021. *Kabupaten Batang Dalam Angka 2020*. Batang 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>

<https://corona.batangkab.go.id/>

<https://dapo.kemendikbud.go.id/>

<https://lokadata.id/artikel/rasio-murid-guru-cukup-sebaran-masih-kurang>



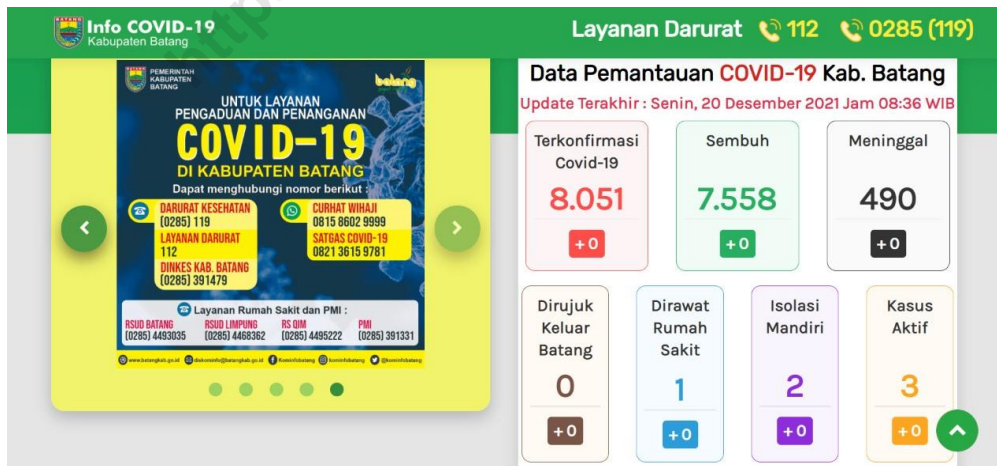
<https://batangkab.bps.go.id>

Lampiran 1. Statistik Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Batang

KPC PEN KOMITE PENANGANAN COVID-19 DAN PERUBAHAN EKONOMI NASIONAL	VAKSINASI PROGRAM				VAKSINASI GOTONG ROYONG				TOTAL CAKUPAN VAKSINASI			
	1	2	3	Total Suntikan	1	2	3	Total Suntikan	1	2	3	Total Suntikan
	404.707	198.634	2.385	605.726	0	0	0	0	404.707	198.634	2.385	605.726
	65.04%	31.92%	0.38%	48.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.04%	31.92%	0.38%	48.67%
Penerima Vaksin > Control Tower Vaksin KTP	SDM KESEHATAN				LANSIA				PETUGAS PUBLIK			
	1	2	3	Total	1	2	3	Total	1	2	3	Total
	3.454	3.328	2.377	9.159	36.384	15.514	0	51.898	56.437	47.899	0	104.336
	143.32%	138.09%	98.63%	138.09%	53.20%	22.68%	0.00%	22.68%	123.03%	104.42%	0.00%	104.42%
	Selengkapny				Selengkapny				Selengkapny			
	MASY RENTAN & UMUM				REMAJA				ANAK-ANAK			
	1	2	3	Total	1	2	3	Total	1	2	3	Total
	253.731	99.723	8	353.462	54.655	32.170	0	86.825	46	0	0	46
	58.68%	23.06%	0.00%	23.06%	74.70%	43.97%	0.00%	43.97%	0.06%	0.00%	0.00%	0.06%
	Selengkapny				Selengkapny				Selengkapny			
	UJI KLINIS				IBU HAMIL				DISABILITAS			
	1	2	3	Total	1	2	3	Total	1	2	3	Total
	0	0	0	0	180	162	0	342	22	18	0	40
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.03%	0.00%	0.03%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%
	Selengkapny				Selengkapny				Selengkapny			

Tanggal 14 Desember 2021 telah dimulainya Vaksinasi Anak-anak

Lampiran 2. Statistik Kasus Covid di Kabupaten Batang





Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

Jalan Pemuda No. 90 Batang 51216

Telp/Fax (0285) 391004

Homepage: batangkab.bps.go.id Email: bps3325@bps.go.id

ISBN 978-623-7979-34-0



9 786237 979340